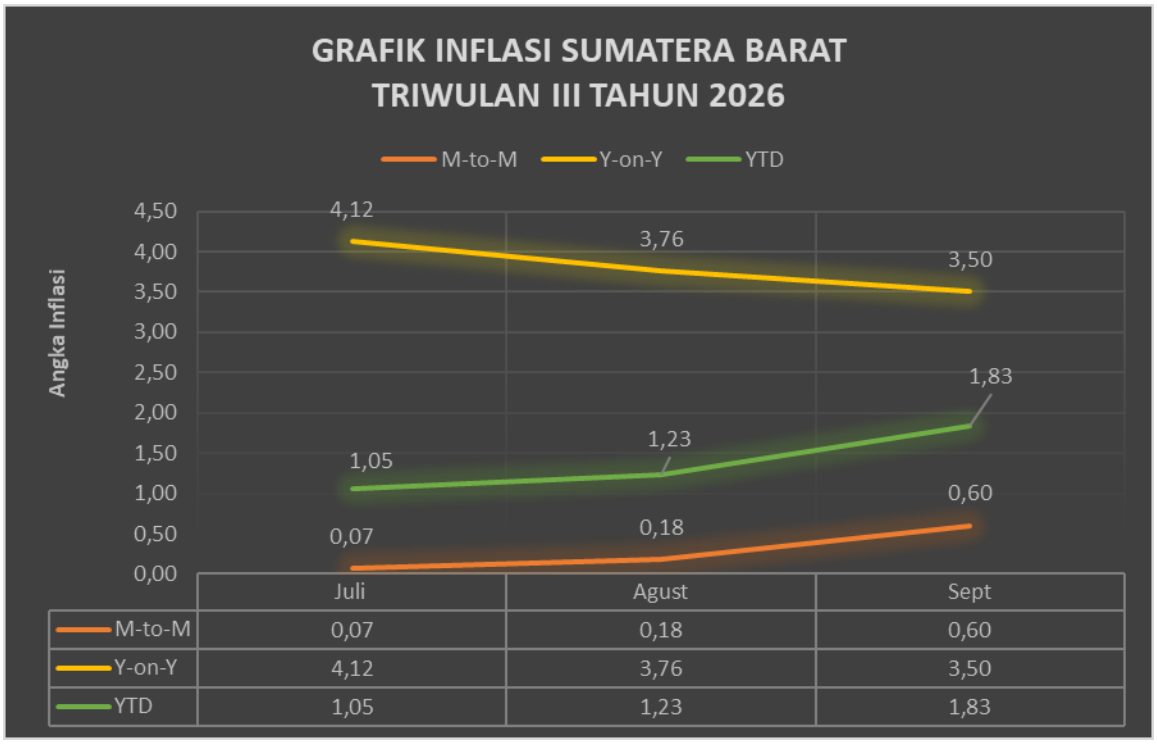
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan III Tahun 2026, sebagai berikut :

   1. Juli 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,07% (mtm) yang disumbang dari kelompok transportasi 0,12% (mtm) dan Kelompok penyediaan makanan dan minuman/Restoran -0,31% (mtm), dengan komoditas penyumbang inflasi adalah : daging ayam ras sebesar 0,09% (mtm), Bensin sebesar 0,06%(mtm), jengkol 0,05%(mtm), cabe rawit sebesar 0,04%(mtm), pemeliharaan/service sebesar 0,04% (mtm). Komoditas penyumbang deflasi adalah bawang merah -0,17% (mtm), cabe merah sebesar -0,11% (mtm), emas perhiasan sebesar -0,08% (mtm), pepaya sebesar -0,01% (mtm) dan minyak goreng sebesar (-0,01). Sedangkan secara tahunan inflasi Juli 2026 sebesar 4,12% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 2,88% (yoy).
   2. Agustus 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,18% (mtm) yang disumbang dari makanan, minuman dan tembakau (0,33%) dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran (0,03%) dan kelompok transportasi (-0.59%). Adapun komoditas penyumbang inflasi adalah daging ayam ras (0,23%), cabe rawit (0,05%), emas perhiasan (0,05%), ikan tongkol/Ambu ambu (0,03%) dan beras (0,02%) serta komoditas penyumbang deflasi adalah cabe merah (-0,10%), jengkol (-0.07%), angkutan udara (-0,06%), tomat (-0,05%) dan cabe merah (-0,03%). Sedangkan secara tahunan inflasi Agustus sebesar 3,76% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional 2026 yakni 3,19% (yoy).
   3. September 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,60% (mtm) yang disumbang dari kelompok Makanan, minuman dan tembakau (0,40%), Transportasi (1,77%), dengan komoditas penyumbang inflasi adalah cabe merah (0,47%), daging ayam ras (0,03%), beras (0,03%) cabe hijau (0,03%) dan ikan cakalang/Sisik (0,03%). Untuk komoditas penyumbang deflasi adalah emas perhiasan (-0,04%), cabai rawit (-0,02%), angkutan udara (-0,02%) jengkol (-0,02%) dan kentang (-0,02%). Sedangkan secara tahunan inflasi September sebesar 3,50 (yoy), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya 3,28% (yoy).

   Berikut fluktuasi inflasi Sumatera Barat pada Triwulan III tahun 2026 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, baik secara bulanan, tahunan dan year to date, sebagai berikut :



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan III realisasi inflasi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dengan trend peningkatan yang fluktuatif yang didominasi dri kelompok makanan, minuman dan tembakau dari komoditi seperti cabe merah, cabe rawit, daging ayam ras, beras dan dari kelompok administered price yakni bensin dan emas perhiasan.

Penyebab kenaikan harga cabe merah selama periode triwulan III di sebabkan oleh terbatasnya pasokan dari daerah produsen akibat musim kemarau yang terjadi pada beberapa daerah sentra terutama di Pulau Jawa yang menghasilkan citra rasa cabe jawa yang tidak pedas dan disukai oleh masyarakat di Sumatera Barat. Sedangkan untuk cabe lokal pengaruh cuaca panas menyebabkan produksi cabe merah sedikit karena cabenya busuk dan cabe yang ada di jual ke provinsi tetangga, sehingga ketersediaan cabe yang ada di Sumatera Barat terbatas yang menyebabkan harga cabe tinggi di pasar. Demikian juga untuk cabe rawit produksi terbatas dan pemintaan tinggi dengan karakteristiknya yang sama dengan cabe merah.

Sedangkan untuk daging ayam ras terjadi kenaikan harga disebabkan oleh tingginya permintaan ditengah beroperasinya kembali MBG dan adanya pembatasan produksi DOC beberapa waktu yang lalu dimana 50% nya diserahkan ke peternak lokal sehingga memicu terjadinya kenaikan harga mencapai Rp. 27.000,- ditingkat petani, yang selanjutnya pedagang mengambil keuntungan sebesar Rp. 5.000 s.d Rp. 10.000 sehingga harga jual ke konsumen menjadi tinggi dan disertai ongkos angkutnya yang naik akibat kenaikan harga BBM sehingga

terkendala distribusi yang menyebabkan harga meningkat. Disamping itu, daging ayam ras asal Sumatera Barat juga di jual ke propinsi tetangga seperti Riau yang jaraknya sangat dekat dengan sentra produksi ayam ras.

Untuk BBM harganya ditetapkan oleh Pemerintah dan ini tidak bisa diintervensi, sedangkan emas perhiasan ditentukan oleh harga emas dunia juga tidak bisa diintervensi dan kondisi ini diperkuat oleh budaya masyarakat Sumatera Barat yang senang membeli emas untuk investasi maupun untuk hadiah hajatan kepada sanak saudara yang menjadi tradisi masyarakat Sumatera Barat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar inflasi tetap terjaga, tim pengendalian inflasi Sumatera Barat selama Triwulan III tahun 2026 telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut :

A. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan Gerakan Pasar Murah/Operasi Pasar .
2. Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II
3. Pendistribusian beras SPHP dan penyaluran minyak goreng Minyakita ke pasar-.
4. Intervensi harga dengan memaksimalkan peran TTI center untuk melakukan GPM/OP.

B. Ketesediaan Pasokan

1. Himbauan gerakan menanam cabe di pekarangan/polybag dan gerakan beternak mandiri (ayam petelur skala rumah tangga).
2. Membangun dan mengaktikan greenhouse khusus cabe merah di 4 wilayah IHK sebagai penyangga pasokan lokal.
3. Percepatan penyaluran alat mesin pertanian dan benih padi.
4. Penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan Bulog.
5. Berkoordinasi dengan perusahaan integrator besar untuk mengamankan pasokan pakan, DOC dan kestabilan harga daging/telur ayam ras.
6. Pengaturan pola tanam berkoordinasi dengan BMKG.
7. Mendorong Kab Kota terutama 4 Daerah IHK untuk KAD dengan Champion
8. Pemberian subsidi ongkos angkut bahan pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit.
9. Bank Indonesia menginisiasi pelaksanaan pasar murah terutama pada daerah IHK.

~~C.~~ Kelancaran Distribusi

1. Mengoptimalkan KAD berbasis B to B dengan menghubungkan kelompok tani sentra dengan off-taker dan pedagang pasar yang defisit.
2. Subsidi Transportasi dan efisiensi Rantai Pasok.
3. Pengendalian Distribusi BBM Subsidi dengan menerbitkan Instruksi Gubernur No. 1/INST-20266 tentang [engendalian dan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan.
4. Membentuk Satgas Pengendalian BBM, penempatan personil TNI/Polri di SPBU serta pengetatan verifikasi surat rekomendasi pembelian BBM non-kendaraan bersama Polda Sumbar, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Guna menekan penyelewengan dan

antrian panjang.
5. Percepatan perbaikan jalan dan jembatan dan infrastruktur lainnya dalam mendukung mobilisasi komoditi pangan.

D. Komunikasi Efektif

1. Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendagri setiap minggu;
2. Menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi;
3. Melaksanakan HLM TPID dan Rapat-rapat teknis pengendalian inflasi dengan TPID Provinsi dan TPID Kab Kota se Sumatera Barat.
4. Menerbitkan surat Gubernur Nomor 500/200/IX/Ro-EkoSetda/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Tindak Lanjut HLM TPID Triwulan III Tahun 2026 sebagai arahan teknis bagi Kabupaten/Kota.
5. Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/174/Ro-Eko Setda/IX/2026 tanggal 6 September 2026 perihal hasil evaluasi kegiatan Pada Roadmap TPID Triwulan II 2026 yang ditujukan ke OPD terkait di provinsi.
6. Surat sekretaris Daerah Nomor 500/185/Ro-Eko Setda/IX/2026 tanggal 11 September 2026 perihal Inlasi Year on year pada daerah IHK yang ditujukan ke 4 Kab Kota Daerah IHK.
7. Surat Gubernur Nomor 500/200/IX/Ro-Eko Setda/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Tindak Lanjut HLM TPID III Tahun 2026 yang ditujukan ke Bupati/Walikota se Sumatera Brat dan OPD teknis terkait di {rovinsi.
8. Surat sekretaris Daerah Nomor 500/198/Ro-Eko Setda/IX/2026 tanggal 26 September 2026 perihal Permintaan Data pedagang untuk KAD dengan Champion yang ditujukan 4 Kab Kota Daerah IHK.
9. Surat sekretaris Daerah Nomor 500/184/Ro-Eko Setda/IX/2026 tanggal 7 September 2026 perihal Tindak Lanjut Rakor INflasi Kemendagri 7 September 2026.
10. Pengembangan sistim informasi & Early Warning System (EWS) melalui pemaharuan data neraca pangan harian dan penguatan sistem KIAT SUMBAR dan on progress rancangan aplikasi sadar pangan sebagai sistim database harga dan neraca pangan terinterasi.
11. Publikasi data harga dan ketersediaan stok pangan secara transparan dan masif kepada masyarakat.
12. Kedisiplinan pelaporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) melalui pengunggahan laporan harian pengendalian inflasi ke Portal wassinflasi.
13. Asistensi dan evaluasi kepatuhan daerah, dimana kepatuhan pelaporan Harian Kab Kota di Sumbar meningkat dari 65% menajdi 80% per September 2026.
14. Selalu memantau kegiatan TPID Kabupaten Kota melalui aplikasi KIAT SUMBAR.
15. Memperkuat koordinasi antar TPID Provinsi dengan TPID Kab Kota, BMKG, Pelaku Usaha dan kelompok Tani dalam Pengendalian Inflasi
16. Mengoptimalkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam perencanaan tanam.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan selama triwulan III 2026 (periode Juli s.d September) realisasi inflasi menunjukan pergerakan yang positif dengan trend yang melandai,

kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi sepanjang Triwulan III berhasil diredam secara konsisten yang puncaknya 4,70% pada Juni 2026 dan turun ke angka 3,50% di bulan September 2026 akan tetapi masih berada diatas sasaran inflasi nasional. Pada Juli 2026 inflasi bulanan relatif terjaga diangka 0,07% (mtm), Agustus (0,18% mtm) dan September 2026 sebesar 0,60% (mtm) mengalami lonjakan signifikan yang dipicu oleh kenaikan harga cabe merah, daging ayam ras dan beras.

Evaluasi berdasarkan strategi 4K dari sisi keterjangkauan harga menunjukan bahwa pelaksanaan gerakan pangan murah/operasi pasar yang masif dilaksanakan mampu menahan lonjakan harga, namun kedepan perlu penekanan untuk daerah IHK perlu penetrasi GPM sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

Dari sisi ketersediaan pasokan penguatan produksi lokal dilakukan melalui bantuan alsintan, bantuan irigasi/pompanisasi, pembangunan greenhouse di 4 daerah IHK dan gerakan menanam cabe, sedangkan untuk daging ayam ras perlu koordinasi dengan integrator peternakan seperti JPFA dan CPIN untuk menjaga stabilitas pakan dan DOC.

Selanjutnya pelaksanaan kerjasama antar daerah berbasis bisnis to bisnis berhasil memindahkan pasokan komoditas surplus dengan adanya subsidi ongkos angkut.

Pelaksanaan rutin rapat koordinasi mingguan dengan Kemendagri semakin memperkuat koordinasi dan semakin lengkap dengan adanya aplikasi pembaharuan EWS pada portal KIAT SUMBAR dan aplikasi SADAR PANGAN yang sedang dirancang berupa sistim database harga dan neraca pangan terinterasi.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi Triwulan III 2026 di Sumatera Barat menunjukkan hasil dalam menurunkan tren inflasi tahunan (y-on-y) dari 4,70% pada Juni menjadi 3,50% pada September. Namun, tingginya inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,60% pada September mengindikasikan perlunya efisiensi rantai pasok KAD lokal (mencegah kebocoran pasokan surplus ke luar provinsi) serta pengetatan distribusi BBM subsidi menjelang Triwulan IV.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari beberapa kegiatan pengendalian inflasi selama triwulan III Tahun 2026 beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah berdasarkan strategi 4 , sebagai berikut:

A.Keterjangkauan Harga

1. Tetap melaksanakan Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar secara terukur (tepat waktu, lokasi dan sasaran) yang berkesinambungan di daerah sampel IHK serta wilayah IPH yang indeknya tinggi yang berkolaborasi dnegan Perum Bulog dan Ban Indoensia.
2. Oprtimalisasi penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan dengan memastikan percepatan penyaluran tahap II dan mengguyur beras SPHP ke pasar pasar tradisonla disertai pengewasan ketat terhadap kualitas beras bantuan
3. Pemanfaatan dana BTT APBD secara akuntabel untuk intervensi harga dan subsidi ongkos angkut 9 bahan pokok saat terjadi gejolak harga.

Memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD serta mengoptimalkan skema serap-simpan menggunakan cold storage guna menyerap pasokan saat panen raya .

B. Ketersediaan Pasokan

1. Memaksimalkan implementasi surat edaran Gubernur terkait gerakan tanam cabe dipekarangan dengan polybag yyang didukung dengan penganggaran tingkat nagari/desa serta mengaktifkan greenhouse khusus cabe merah di 4 daerah IHK sebagai penyangga pasokan lokal.
2. Mengekselerasi penyaluran bantuan alsintan, benih dan alokasi pupuk bersubsidi berbasisi E RDKK dan memitigasi resiko kekeringan pada sentra hortikultura.
3. Membangun kesepakatan bersama perusahaan integrator peternakan (JPFA dan CPIN) untuk mejamin kepastian pasokan pakan, DOC dan stabilitas harga daging dan telur ayam ras ditingkat peternakn dan konsumen.
4. Menyusun kelender tanam yang terintegrasi dengan data BMKG serta menambah luas tanam komoditatas hortikultura di daerah defisit.

C. Kelancaran Distribusi

1. Memfasilitasi KAD berbasis B to B antara daerah sentra surplus langsung dengan offtaker.
2. Mendorong Kab Kota IHK untuk melaksanakan KAD dengan daerah champion.
3. Mengimplementasikan **Instruksi Gubernur No. 1/INST-2026** secara tegas melalui pembentukan/operasionalisasi Satgas BBM di seluruh Kab/Kota, penempatan personel TNI/Polri di SPBU, penataan antrean kendaraan logistik, serta pengetatan verifikasi STNK, QR Code, dan surat rekomendasi pembelian BBM non-kendaraan bersama Polda Sumbar, Pertamina, dan Hiswana Migas.
4. Mempercepat pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan infrastruktur jalan/jembatan pendukung kelancaran distribusi pangan.

D. Komunikasi Efektif

1. Menyelenggarakan Rakor Mingguan Kemendagri, HLM TPID, dan rapat evaluasi teknis secara rutin antara TPID Provinsi dan Kab/Kota untuk merespons gejolak harga secara cepat.
2. Memperbarui data neraca pangan harian pada portal **KIAT Sumbar** (EWS Sipantara dan Simantab) serta mengakselerasi integrasi aplikasi **SADAR PANGAN** sebagai database harga dan neraca pangan terpadu.
3. Mendorong tingkat kepatuhan pelaporan harian IPH seluruh Kabupaten/Kota ke portal Wasinflasi Kemendagri hingga mencapai 100%, dengan memberikan asistensi khusus kepada daerah yang belum tertib lapor (Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto).
4. Mempublikasikan data harga dan ketersediaan stok pangan secara transparan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, serta melakukan rekonsiliasi data IPH antara SP2KP Kemendagri dengan kondisi riil lapangan bersama BPS dan Dinas Perindag.

4.